

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

“Wajah Islam: Antara Militansi dan Toleransi”

WACANA

Chaider S. Bamualim

Konsolidasi Militan Islam dan Reproduksi Makna Jihad

Mardani

Syariat Islam dalam Yuridis Formal: Studi atas Nanggroe Aceh Darussalam

Sirojuddin Aly

Konstruksi Tatanan Dasar Politik dalam Islam

Haniah Hanafie

Transformasi Peran Ulama dalam Pergerakan Politik

Ahmad Abrori

Merayakan Toleransi: Studi atas Masyarakat Muslim Pandeglang

TULISAN LEPAS

Rosmaria Syafariyah Widjajanti

Kesatuan dan Harmoni dalam Masyarakat Jawa

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. VIII, No. 1, 2006

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Amsal Bakhtiar
Kautsar Azhari Noer
Hamdani Anwar
Zainun Kamal F

Pemimpin Redaksi

Edwin Syarif

Anggota Redaksi

Wiwi Siti Sajaroh
A. Bakir Ihsan

Sekretariat

Suzanti Ikhlas

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Editorial

- ~ Wajah Islam: Antara Militansi dan Toleransi

Articles

- 1-18 **Konsolidasi Militan Islam dan Reproduksi Makna Jihad**
Chaider S. Bamualim
- 19-30 **Syariat Islam dalam Yuridis Formal: Studi atas Nanggroe Aceh Darussalam**
Mardani
- 31-50 **Konstruksi Tatanan Dasar Politik dalam Islam**
Sirojuddin Aly
- 51-64 **Transformasi Peran Ulama dalam Pergerakan Politik**
Haniah Hanafie
- 65-78 **Merayakan Toleransi: Studi atas Masyarakat Muslim Pandeglang**
Ahmad Abrori

Document

- 79-90 **Gerakan Anti Korupsi dan Restrukturisasi Gaji Pegawai Negeri**
Achmad Zainuri
- 91-104 **Kesatuan dan Harmoni dalam Masyarakat Jawa**
Rosmaria Syafariyah Widjajanti
- 105-118 **Sains dan Agama dalam Epistemologi Islam dan Barat**
Edwin Syarif

WAJAH ISLAM: ANTARA MILITANSI DAN TOLERANSI

ISLAM mengalami evolusi sesuai konteks sosial budaya dan politik yang mengitarinya. Itu pula yang menyebabkan Islam lahir dalam beragam wajah. Militansi dan toleransi adalah di antara wajah Islam. Keduanya bisa hadir secara bersamaan, tapi bisa berhadapan secara frontal. Hal tersebut terlihat dari ragam pemaknaan terhadap realitas sosial yang disajikan oleh para penulis di dalam jurnal **Refleksi** kali ini.

Tulisan pertama disajikan oleh Chaider S. Bamualim yang mengkaji masalah konsolidasi militan dalam Islam melalui reproduksi makna jihad. Menurutnya Islamisasi yang melanda dunia Islam dalam dasawarsa belakangan berhasil mengkonsolidasi gerakan Islam dan mereproduksi makna jihad. Lebih dari itu, hal tersebut telah berhasil mengaktifkan jihad sebagai instrumen ideologis yang kontroversial. Gejala ini secara tak terelakkan sering-kali menimbulkan kesalahpahaman, baik oleh kaum Muslim sendiri maupun kalangan non-Muslim di Barat maupun di Timur. Bagi sebagian sarjana Barat, jihad yang merupakan ajaran Islam adalah perang agama (*holy war*), karenanya, Islam dicap sebagai agama brutal, yang menerapkan pola-pola militerisme serta menyatakan perang bukan saja absah tetapi juga suci.

Proses Islamisasi juga menjelma dalam bentuk formalisasi syariat yang diterapkan dalam sebuah negara bangsa (*nation state*). Hal tersebut sebagaimana dipotret oleh Mardani dalam penerapan syariat di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Penerapan syariat di bumi rencong ini tidak terlepas dari perjuangan panjang rakyat Aceh dalam upaya mendapatkan status otonomi khusus. Setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan akhirnya Rancangan Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disahkan menjadi Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal mendasar dari Undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk menggali dan mengimplementasikan tata

bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara dari dulu hingga sekarang memerlukan seperangkat tatanan, baik yang bersumber dari ajaran agama secara langsung atau melalui keputusan-keputusan berdasarkan keperluan kontemporer, baik tatanan itu sudah diundangkan secara tertulis atau belum ditulis, baik tatanan itu bersifat asasi (undang-undang dasar) atau pengembangan. Menurut Sirojuddin Aly dengan tatanan yang ada, kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi teratur dan tertib. Sebaliknya tanpa adanya seperangkat tatanan, dapat dipastikan kehidupan bermasyarakat menjadi semrawut, tidak teratur dan pasti akan terjadi hukum rimba. Sirojuddin Aly mencoba mengemukakan beberapa prinsip dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara dari perspektif pemikiran politik Islam, seperti prinsip musyawarah, persamaan, kemerdekaan, penegakan keadilan dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini ternyata merupakan nilai-nilai universal, di mana bangsa-bangsa yang beradab dalam bermasyarakat dan bernegara juga menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Namun dalam rangka kontekstualisasi, penafsiran dan pemaknaan terhadap prinsip-prinsip tersebut sering tak terelakkan.

Hal ini juga terjadi dalam memahami peran dan fungsi ulama. Menurut Haniah Hanafie, ulama atau kiai sering dipahami sebagai sumber panutan keagamaan. Namun dalam perkembangannya, ulama tidak hanya sebagai panutan dalam menjalankan ajaran agama, tetapi seluruh aspek kehidupan, sehingga semua perilaku dan tindakan ulama akan ditiru tanpa reserve. Bahkan masyarakat pengikutnya (jamaahnya) cenderung membenarkan atau melindunginya apabila sang ulama mengalami tantangan dari pihak lain. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap ulama sangat diutamakan atau dengan istilah lain *taqlid*. Peran ulama yang dikenal selama ini hanya sebagai pendakwah, penceramah, pengasuh pondok pesantren dan pemuka agama, ternyata tidaklah demikian, karena sejarah membuktikan bahwa ulama juga ikut berperan dalam politik praktis, baik pada masa Kolonial Belanda, Jepang dan Kemerdekaan. Namun pada masa Orde Baru peran Ulama mengalami penyempitan. Ulama dikembalikan kepada peran awalnya sebagai sumber pengetahuan dan keteladanan keagamaan.

Muara dari wacana dan aktualisasi ajaran agama adalah terciptanya tatanan yang harmonis dan penuh kedamaian. Hal tersebut bisa dicapai

apabila di dalam diri masyarakat terserap nilai-nilai yang menjunjung toleransi. Menurut Ahmad Abrori masalah toleransi sesungguhnya terkait dengan artikulasi wacana dan realisasi praktiknya dalam kehidupan nyata. Keduanya saling terkait dan saling mendukung bagi terciptanya hubungan yang baik antar umat beragama. Namun disayangkan, apa yang menjadi kenyataan sehari-hari tidak didukung oleh artikulasi wacana secara baik. Akibatnya, terdapat ketegangan wacana di kalangan masyarakat bila membicarakan toleransi. Hal inilah yang terlihat dalam masyarakat Pandeglang, Banten.

Refleksi kali ini juga menurunkan tulisan yang mengulas tentang pemberantasan korupsi. Menurut Achmad Zainuri geliat dan gegap gempita pemberantasan korupsi yang berlangsung saat ini tidak lepas dari lampu hijau dan kemauan politik (*political will*) yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada periode sebelumnya, pemberantasan korupsi berjalan setengah hati dan tersendat-sendat karena ada sebagian tersangka korupsi kakap yang mendapat proteksi dari orang kuat, sehingga kasusnya mengendap.

Kajian lain terkait dengan harmoni disajikan oleh Rosmaria. Berdasarkan studi terhadap masyarakat Jawa, hubungan antara manusia dengan Tuhan merupakan suatu kesatuan dan harmoni. Hubungan yang selaras ini sebagai model bagi hubungan antara manusia dengan masyarakat. Usaha untuk mencapai keselarasan dilakukan dengan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian kesatuan individu dan masyarakat menyiratkan adanya keteraturan. Ancaman terhadap harmoni ini adalah ambisi dan nafsu pribadi. Seseorang dalam masyarakat yang terlalu ambisi dan mengedepankan kehendak pribadi dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial.

Sebagai penutup, Edwin Syarif memaparkan permasalahan hubungan antara sains dan agama. Perkembangan hubungan antara sains dan agama mengalami pergeseran pada masa modern, yaitu munculnya sains-sains sekuler yang menolak agama. Sains dan agama dalam masa kejayaan Islam tidak pernah berpisah bahkan keduanya saling mendukung. Oleh karena itu di masa sekarang ini, perlu adanya sintesis epistemologi antara Islam dan Barat, yang kelak diharapkan dapat memunculkan sains-sains yang dapat mengatasi permasalahan manusia tanpa dibarengi dengan dampak negatif dari sains itu sendiri.

Rangkaian sajian tulisan dalam **Refleksi** kali ini merupakan ekspresi dari ragam dimensi kemanusiaan yang penuh harmoni dan toleransi di satu sisi, dan militansi di sisi yang lain. Selamat membaca.

Jakarta, Januari 2006

Redaksi

KESATUAN DAN HARMONI DALAM MASYARAKAT JAWA

Rosmaria Syafariyah Widjanti

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

rosmaria.widjanti@uinjkt.ac.id

Abstract: *In societal life, problems arising from interaction processes are inevitable. Various interests flowing through diverse cultures within society do not always end in conflict and violence. There is harmony and unity that can emerge from social interactions. This is evident in Javanese society, which emphasizes the principles of harmony in its social relations. In Javanese society, the relationship between humans and God is seen as a unity and harmony. This harmonious relationship serves as a model for the relationship between humans and society. Efforts to achieve harmony are made by maintaining order within society. Thus, the unity of the individual and society implies the existence of order. Threats to this harmony include personal ambition and desires. Someone in society who is too ambitious and prioritizes personal desires is considered a threat to social order.*

Keywords: *Philosophy, Unity, Harmony, Javanese Society.*

Abstrak: Dalam kehidupan bermasyarakat, problem yang hadir dari proses interaksi merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Beragam kepentingan yang mengalir sepanjang ragam budaya dalam masyarakat tidak selalu berakhir dengan konflik dan kekerasan. Ada harmoni dan kesatuan yang dapat lahir dari interaksi sosial. Hal ini terlihat dari masyarakat Jawa yang mengedepankan prinsip-prinsip keharmonisan dalam relasi sosialnya. Dalam masyarakat Jawa, hubungan antara manusia dengan Tuhan merupakan suatu kesatuan dan harmoni. Hubungan yang selaras ini sebagai model bagi hubungan antara manusia dengan masyarakat. Usaha untuk mencapai keselarasan dilakukan dengan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian kesatuan individu dan masyarakat menyiratkan adanya keteraturan. Ancaman terhadap harmoni ini adalah ambisi dan nafsu pribadi. Seseorang dalam masyarakat yang terlalu ambisi dan mengedepankan kehendak pribadi dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial.

Kata Kunci: Filsafat, Kesatuan, Harmoni, Masyarakat Jawa.

Pendahuluan

Di dalam sejarah filsafat Yunani Kuno, telah terjadi pertikaian intelektual tentang asal segala sesuatu atau asas-asas yang menerangkan kejadian di alam semesta. Topik yang dipermasalahkan berkaitan dengan menjawab pertanyaan asal mula terjadinya dunia ini. Para filsuf Yunani memberikan jawaban beragam, antara lain memberikan jawaban bahwa alam berasal dari air, atau dari udara, atau dari tanah, atau dari api. Permasalahan asal usul alam semesta ini merupakan kajian bidang Kosmologi. Kosmologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang membahas tentang alam semesta. Dilihat dari perspektif kosmologis Jawa, bahwa kejadian alam sesungguhnya terjadi tidak dalam cara yang sembarangan, melainkan suatu keseluruhan teratur yang tunduk pada takdir. Alam hadir bukan atas kemauan sendiri. Takdir tersebut dikenal sebagai prinsip kepastian. Prinsip yang pasti ini merupakan hal yang niscaya yang disebut dengan kebenaran. Pramono mengungkapkan hasil dari takdir sebagai *kebeneran* atau kebenaran.¹ *Kebeneran* berasal dari kata *bener*, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya benar. Maksudnya *bener* adalah hal yang sudah pasti benar.

Menurut pandangan Jawa, manusia merupakan bagian alam semesta (kosmos). Alam semesta sebagai jagat gede yang di dalamnya terdapat manusia. Keberadaan manusia demikian dicirikan sebagai berikut: Pertama, manusia bisa memilih dan mempunyai kehendak bebas. Pilihan

dapat saja bodoh, emosional, tak bermoral atau sebaliknya sadar, bijaksana, dan bermoral. Kedua, manusia terdiri dari dua bagian yaitu *lair* dan batin. *Lair* maksudnya lahir yaitu bersifat tampak di permukaan. Sedangkan batin adalah yang tersembunyi. Bagian lahir memiliki lima indra dan mempunyai kemampuan berpikir rasional. Sedangkan bagian batin yang tersembunyi merupakan jalur menuju asal seseorang dan mengandung tanda hidup. Bagian ini mempunyai indra keenam, perasaan batin intuitif yang lazim disebut rasa, yang merupakan instrumen bagi wawasan terdalam.²

Hubungan-hubungan sosial antara individu dan masyarakat atau antara individu-individu dalam masyarakat, seperti halnya hubungan kosmis. Hubungan ini tertata dengan baik dan berpadu dalam sebuah keseluruhan harmonis. Menurut pandangan Jawa tentang masyarakat, hubungan semacam itu terbangun secara hierarkis, orang menduduki posisi status tertentu yang terkait satu sama lain dengan cara yang tidak sederajat secara moral. Tertib masyarakat ini adalah bagian dari tertib kosmis total.³

Dalam etika Jawa, terdapat perintah untuk mencari budaya. Pengertian budaya dimaksud adalah pengetahuan dan kebijaksanaan. Melalui budaya itu seorang dituntun untuk mengetahui kedudukannya dalam masyarakat. Seseorang akan mengetahui etika dan kewajiban di tempat kedudukan bersangkutan berada. Menjadi kewajiban orang tersebut menjalani kehidupan menuruti kewajiban yang terdapat dalam kedudukan yang dimiliki tersebut. Mereka wajib menghargai tertib masyarakat, berbakti kepada orang yang lebih tua dan lebih tinggi kedudukannya, serta memperlakukan yang lebih rendah dengan *tepa slira*. Manusia harus mengadakan hubungan yang selaras, walaupun hanya di sisi luar saja, untuk menghindari setiap konflik terbuka. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan penguasaan diri, pengendalian dorongan dan emosi. Dengan demikian seseorang dituntut memperkuat diri dimensi batinnya.

Pengasahan batin ini dikenal sebagai olah rasa atau kebatinan. Batin yang sudah tertata dikenal dengan batin yang telah tebal.⁴ Batin yang tebal membuat yang bersangkutan menjadi sabar dan memungkinkan seseorang tidak terganggu oleh kejadian di dunia lahir. Hal ini membuat seorang dapat menerima kehidupan apa adanya dan menyesuaikan diri dengan kehidupan yang serba alami (*natural*). Hal ini merupakan latihan penajaman indra dan perasaan, yang menghasilkan pengetahuan yang

tepat untuk bertindak. Menciptakan perasaan yang selaras dengan kejadian-kejadian kosmis dan akhirnya berujung pada pencarian penyatuan diri dengan asal dan tujuan hidup, yaitu kebenaran. Inilah pengertian mistis yang disebut paling akhir dari kebatinan yang menampakkan religiositas yang jelas. Dari laku yang demikian terjadi keterpaduan pikiran dan perasaan batin yang merupakan jalan menuju kebijaksanaan dan kehidupan etis.⁵

Menjalani hidup dalam keseharian orang Jawa, dipahami sebagai situasi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Diri tenggelam di dalam situasi yang lebih besar, seperti tertib masyarakat maupun kosmos. Menjalani kehidupan ini, individu tidak dapat tidak kecuali bermoral dan bijaksana. Gangguan terhadap tertib ini merupakan tindakan yang tak bermoral. Maka menjadi kewajiban moral bagi seseorang adalah menjalani hidupnya sendiri dan mengisi posisi sebagai kedudukannya di dunia ini. Karena sesungguhnya hidup yang sejati adalah hidup pada saat ini.

Sikap batin orang Jawa harus mengarah pada berpusat pada ke-*diri*-an yang kuat. Seseorang harus menerima pengalaman di masyarakat, peraturan, dan penderitaannya, namun kebenaran sejati ada di dalam diri yang terdalam. Menjadi tugas moral dan etis seseorang adalah mengasah pikiran, mencari kebenaran, dan mengisi kedudukannya dalam sebuah semesta posisi yang tidak sederajat. Hubungan yang harmoni dengan orang lain dalam suatu masyarakat menjamin tidak terusik batinnya, dan menghindari konflik, dan memupuk toleransi yang besar ketika berhadapan dengan orang lain. Dalam batin seseorang, seseorang berpotensi untuk hidup merdeka, walaupun orang tersebut hidup dalam masyarakat yang serba hierarkis.⁶

Kosmologi Jawa: Kesatuan Eksistensi

Di dalam masyarakat Jawa, hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai suatu kesatuan dan harmoni. Hubungan yang selaras ini sebagai model bagi hubungan antara manusia dengan masyarakat.⁷ Usaha untuk mencapai keselarasan dilakukan dengan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian kesatuan individu dan masyarakat menyiratkan adanya keteraturan. Ancaman terhadap harmoni ini adalah ambisi dan nafsu pribadi. Seseorang dalam masyarakat yang terlalu ambisi dan mengedepankan kehendak pribadi dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial. Sebaliknya seseorang yang mengutamakan

orang lain dianggap berlaku menjaga ketertiban masyarakat. Bahkan, berkorban demi keharmonisan sosial akan mendapatkan penghargaan tertinggi dari Tuhan berupa pahala. Oleh karena itu, kedudukan seseorang lebih utama ketika mengalah kepada masyarakat daripada memaksakan kehendak individunya.

Menjadi orang Jawa berarti menjadi berbudaya. Artinya harus mengetahui tatanan, beradab dan sadar terhadap posisi sosial yang dimilikinya. Seorang anak dianggap belum beradab, pada waktu tindak tanduknya belum mengetahui posisi sosial yang dimiliki. Orang demikian dianggap belum *sadar* terhadap posisi dirinya di dalam masyarakat. Istilah yang digunakan terhadap orang yang belum sadar ini adalah *durung Jawa*. Menjadi orang Jawa yang berarti belum berbudaya atau belum beradab. Budaya dalam pengertian Jawa mengandung pengertian beradab. Orang yang beradab ini telah menjadi bijaksana, atau sudah mampu menempatkan diri dalam masyarakat. Dengan kata lain, seseorang menjadi bijaksana ketika dalam tindakannya disertai dengan kemampuan menyadari posisi diri, tempat, dan tata cara serta menyadari keberadaan diri sendiri dan orang lain. Orang sudah berbudaya apabila dalam pergaulannya mampu menunjukkan tata cara yang patut, berbicara dengan kata yang tepat, dan menghormati hierarki sosial yang ada. Pada waktu seseorang dapat berlaku demikian dapat dianggap *lulus* dari ketidakberadaban dan menjadi beradab atau dalam istilah Jawa dari *durung Jawa* menuju *wis Jawa*.

Hal sebaliknya, percekocokan, permusuhan dan kerusuhan tidak disukai oleh manusia Jawa. Menurut pemahaman orang Jawa, tatanan dan keseimbangan dirusak oleh nafsu dan rasa egois yang disebabkan oleh pengejaran kepentingan pribadi. Oleh karena itu masyarakat harus dilindungi dari emosi individu-individu yang mengejar kepentingan diri sendiri ini. Anak-anak masih dapat dimaafkan apabila bertindak sembrono. Karena anak-anak masih dianggap *durung Jawa*, sehingga masih dimaklumi melakukan apa saja sesuka hati. Anak-anak demikian harus dibesarkan dengan kesabaran. Sebagai makhluk yang dalam proses pendidikan, maka demi sedikit anak-anak diarahkan menjadi manusia Jawa. Anak didik ini harus belajar membedakan antara diri mereka dengan kepentingan keluarga dan dengan komunitas yang lebih luas atau masyarakat. Melalui proses ini individu dan masyarakat saling melindungi

oleh internalisasi semua aturan dan ketentuan yang dianggap bisa menjamin keteraturan bentuk sosial.⁸

Hubungan antar manusia dalam masyarakat harus terjalin dengan menyenangkan, ramah dan damai dengan memperlihatkan kesatuan tujuan. Hubungan tersebut didasari semangat rukun. Maksud rukun adalah keadaan yang berada dalam suasana harmoni, tenang dan damai, seperti layaknya hubungan ideal dalam suatu persahabatan, yang tanpa diwarnai pertikaian dan perselisihan, penuh dengan keramahan serta saling tolong-menolong.⁹ Dengan demikian, kehidupan komunal harus dijiwai oleh semangat rukun, yang menghindari perbedaan, kerja sama, saling menerima, dan kesediaan berkompromi. Kehidupan dalam masyarakat yang demikian merupakan kehidupan dalam komunitas ideal menurut masyarakat Jawa.

Secara ideologis maksud rukun identik dengan gotong royong. Nilai rukun biasa diekspresikan dalam bentuk memberi bantuan timbal balik dan saling menolong. Sedangkan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan konsultasi timbal balik di dalam masyarakat disebut musyawarah. Musyawarah yang dianggap benar adalah sebuah prosedur di mana semua pendapat dari individu yang terlibat dalam musyawarah didengarkan. Individu-individu dipandang memiliki kedudukan sama, yang harus dihormati, dan mempunyai hak yang sama dalam memberikan solusi bagi suatu masalah. Dalam musyawarah berusaha mencapai keputusan kelompok dengan cara berunding, merumuskan keputusan bulat atas nama kehendak kelompok yang dinamakan mufakat. Dalam mufakat ini terkandung kesatuan kelompok.

Pengambilan keputusan dalam masyarakat Jawa dalam forum musyawarah ini akibat pengaruh perundingan gaya orang Islam.¹⁰ Musyawarah mengundang citra kesetaraan, kesetaraan pendapat para pesertanya. Pendapat manusia setara ini tidak sesuai dengan pandangan orang Jawa. Gagasan tentang kesederajatan orang di mata Tuhan dan kesederajatan moral sama sekali asing bagi orang Jawa bahkan dianggap mengganggu keselarasan sosial. Anggapan di masyarakat Jawa adalah orang tidak sederajat secara moral, sehingga terdapat hierarki yang menjadi tulang punggung organisasi sosial. Hierarki organisasi ini berfungsi dalam menjamin ketertiban, kondusif untuk menghindari konflik terbuka, dan mempertahankan kesinambungan.

Dalam pandangan orang Jawa, bahwa ketidaksederajatan moral muncul secara alamiah. Menurut pandangan Jawa ini, secara alami orang yang dilahirkan dalam kondisi tidak sama. Di pandang sudut pandang kebatinan Jawa pendapat kesamaan moral ini sesungguhnya bertentangan. Sekalipun semua orang punya indra keenam (rasa intuitif), bukan berarti semua orang berkembang dengan cara yang sama. Sebagian orang Jawa sikap hidupnya berorientasi pada duniawi, yaitu bertujuan pemenuhan lahiriah mendominasi kehidupan mereka. Sebagian orang Jawa, seperti para ahli kebatinan, mengutamakan kepentingan batiniah dan melatih perasaan batin agar menjadi peka terhadap kehadiran Tuhan. Sebagian orang memburu kepentingan diri mereka, sedangkan yang lain menyempurnakan diri demi kesejahteraan sosial.

Kebudayaan dalam pengertian Jawa dapat dipahami sebagai cara hidup. Maka kehidupan orang Jawa bergerak antara kebudayaan kasar dan kehalusan. Budaya halus dianggap lebih beradab dibandingkan dengan budaya kasar. Jika kehalusan lebih diperhatikan maka orang akan diakui unggul secara moral. Dalam kehidupan praktis, hubungan sosial diatur secara hierarkis dalam nuansa kehalusan. Yaitu, pemakaian Bahasa Jawa, berikut tingkah laku yang menyertainya. Dalam berbicara dalam bahasa Jawa harus memperhatikan posisi orang yang diajak bicara. Pilihan kata dilakukan dengan mencerminkan kedudukan, keakraban dan formalitas, usia, jarak sosial, dan peringkat. Di dalam bahasa Jawa, pilihan kata mengungkapkan tatanan yang berlaku.¹¹

Hubungan Individu dan Masyarakat

Masyarakat Jawa sedikit memberikan ruang bagi ekspresi individual. Ekspresi personal - seperti emosi, keinginan yang meluap-luap, merupakan tindakan yang tidak sopan dan merupakan pelanggaran terhadap privasi orang lain. Ekspresi personal demikian dianggap berpotensi mengganggu tatanan kosmis. Kehidupan dalam masyarakat harus dilindungi dari kekacauan dengan menjaga sopan santun, hierarki, dan harmoni. Dengan demikian Individu dan masyarakat tetap berjarak.

Orang harus bersembunyi di balik formalitas dan kesopanan. Maka cara yang baik dalam bertingkah laku di dalam pergaulan di masyarakat melalui cara-cara mengelak. Ketika seseorang harus memberikan persetujuan, maka orang tersebut harus mengatakan *inggih* yang artinya “iya” sebagai tanda persetujuan. Orang tersebut tidak boleh melibatkan

diri dengan urusan orang lain dengan menekan keinginan dan kebutuhannya pribadi. Maka tidaklah mengherankan, jika etika dirumuskan dalam perintah imperatif “jangan” dan bukan “lakukan”. Perintah utama adalah toleran terhadap orang lain (*tepa slira*) atau mengukur dengan ukuran diri sendiri, berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perkataan dan perbuatannya atas perasaan orang lain. Berbuatlah seperti yang ingin diperbuat terhadap diri sendiri. Pemahaman toleran ini terdapat dalam ungkapan, Ati-ati (maksudnya berhati-hati) agar tidak melukai perasaan orang lain; atau *ojo ngrepoti wong liyan*, maksudnya jangan membuat kesulitan bagi orang lain; atau *Ojo ngawe wirange wong liyan* atau jangan membuat orang lain kehilangan muka” Ke semua itu merupakan pengekangan terhadap diri pribadi atau menekan diri pribadi. Karena tidak melibatkan diri itu pertanda baik dan sikap yang bijaksana.

Etika Jawa berpusat kepada pribadi orang yang berpadu dengan kepekaan terhadap kehormatan diri. Seseorang bergantung pada pandangan orang lain. Status yang disandangnya tergantung pada usaha pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam mewujudkan pengharapan-pengharapannya. Jika kedudukan yang dimiliki cukup tinggi maka orang tersebut sudah tidak dapat lagi menyembunyikan muka di hadapan orang masyarakat. Orang tersebut bertindak tanpa memperhitungkan konsekuensi finansial untuk memperlihatkan status sosialnya. Perilaku menunjukkan harga diri orang Jawa ini dapat dilihat dalam menyelenggarakan pesta besar yang mewah. Pertimbangan status sangat sentral dalam kehidupan di Jawa, dengan menempatkan persoalan harga diri menjadi nomor satu.

Pengertian harga diri dalam bahasa Indonesia sama dengan *praja* atau prestise yang timbul karena posisi status seseorang. Dalam pandangan ini harga diri dipandang dengan baik dan mendapat kehormatan berkat status yang dimilikinya. Harga diri merupakan derajat yang dipandang orang lain tentang diri seseorang: posisi orang tersebut dalam masyarakat dan kehidupan sosial yang menjadi identitas seseorang. Pada waktu ke luar individu tersebut memperlihatkan posisinya dan mengidentifikasi dengan prestise yang dilekatkan orang lain pada dirinya.¹²

Gagasan tentang harga diri tergantung pada pengakuan status dan kehormatan yang dilekatkan oleh orang lain terhadap dirinya. Namun terdapat hal lain yang harus dipertimbangkan berkaitan dengan harga diri

ini, yaitu sikap *kaprawiran* atau kesatriaan. Hal ini berarti orang harus punya keberanian mengikuti jalannya sendiri, tidak mengambil pusing dengan pendapat orang lain. Kehidupan yang dijalani sesuai dengan keyakinannya sendiri.

Etika Jawa Sebagai Kebijaksanaan Hidup

Secara prinsip, orang Jawa menginginkan keselarasan di dalam kehidupan di masyarakat. Hal ini dilakukannya dengan mencegah timbulnya konflik-konflik yang melibatkan dirinya dan dengan menghormati kedudukan dan pangkat orang yang terdapat dalam masyarakat. Latar belakang anggapan ini adalah keselarasan dalam masyarakat berhubungan erat dengan keselarasan kosmis. Alam, masyarakat dan individu saling tergantung. Keduanya saling mengandaikan, keselarasan kosmos tergantung keselamatanku sendiri. Sebaliknya untuk menjamin keselamatan manusia tidak boleh mengganggu keselarasan masyarakat. Namun demikian, keselarasan tersebut dapat sempurna apabila diimbangi dengan keselarasan batin. Maka manusia harus mengontrol hawa nafsunya dengan mengembangkan sikap *sepi ing pamrih*. Dengan bersikap demikian, manusia dapat tenang dan setia memenuhi kewajiban kewajibannya sesuai pangkat dan nasibnya atau *rame ing gawe*. Melalui sikap demikian, manusia mencapai suatu keadaan psikis yang disebut *slamet*, maksudnya ketenangan batin dan ketenteraman hidup.¹³

Pusat etika Jawa adalah upaya memelihara keselarasan dalam masyarakat dan kosmis. Keselarasan ini dimaksudkan untuk menjamin selamat dirinya sendiri. Keselarasan kosmis ini hanya dapat dipelihara apabila semua unsur dalam kosmos ini menempati ruangnya masing-masing sesuai dengan kedudukannya yang tepat. Dalam etika Jawa yang penting adalah kategori tempat: *sepi ing pamrih*, yang maksudnya menerima tempatnya sendiri dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Orang tersebut melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia menurut tempatnya dalam kosmos. Setiap individu harus melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan baginya di dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya dan nasibnya.

Agar supaya individu dapat bersikap sesuai kedudukan di dalam kosmisnya, maka manusia harus mengetahui kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam dirinya. Pengetahuan tentang kewajiban-kewajiban ini

dapat diperolehnya dari empat sumber yaitu tuntutan adat-istiadat, tata krama, hierarki dan kerukunan.¹⁴ Di samping manusia harus memahami bahwa ia harus hidup sesuai dengan kewajiban-kewajiban itu. Dengan begitu ia harus bersikap moral dan sikap ini dapat diketahuinya dari batinnya sendiri. Sehingga batin manusia ini harus peka terhadap kedudukannya dalam masyarakat dan kosmos, sehingga manusia ini mengerti, bahwa ia harus memenuhi kewajiban-kewajibannya tanpa beban. Inilah yang disebut dengan perasaan batin atau rasa. Sehingga semakin halus perasaan manusia tersebut maka semakin dapat orang tersebut menyadari dirinya sendiri. Semakin manusia ini bersatu dengan kekuatan-kekuatan ilahi maka semakin benar arah kehidupan dirinya.¹⁵

Dalam pergaulan di Masyarakat orang Jawa menggunakan etika sebagai etika pengertian.¹⁶ Maksudnya etika Jawa bertolak dari rasa. Maksud rasa adalah peka atau empati dengan keinginan orang lain. Rasa ini mula pertama berkembang dalam keluarga inti yang bebas dari tekanan dan paksaan, kemudian dalam lingkungan keluarga yang lebih luas dan kemudian di antara para tetangga. Kemudian berkembang adanya kepekaannya terhadap reaksi-reaksi sesamanya, mulai mengenal rasa takut terhadap dunia luar yang berbahaya, dan mulai tumbuh sikap-sikap moral dasar seperti kejujuran, kesediaan untuk menolong dan rasa keadilan. Muncul dalam batinnya perintah dasar untuk mencegah konflik-konflik dalam masyarakat dan belajar memahami struktur hierarkis masyarakat. Di sini manusia Jawa belajar membedakan bertindak supaya selaras dalam kosmos seluruhnya, sesuai dengan kodrat manusia sebagai bagian dari unsur kosmos tersebut.¹⁷

Untuk mencegah konflik, manusia Jawa selalu menunjukkan sikap hormat yang menduduki peranan penting dalam pengaturan tata pergaulan masyarakat Jawa. Masyarakat mengharapkan agar keselarasan dalam masyarakat dipertahankan, untuk mempertahankan keselarasan ini perlu dipelihara suasana rukun dan kedudukan setiap pihak di dalamnya.

Keselarasan dijunjung tinggi dikarenakan latar belakang pandangan dunia Jawa tradisional. Menurut pandangan itu kekuatan-kekuatan yang sesungguhnya bersifat gaib. Unsur-unsur yang terkait dialam dunia mengikuti jalur-jalur yang telah ditentukan dan upaya untuk mengubah jalan dunia merupakan usaha yang sia-sia. Kedudukan manusia telah ditentukan atau di anggap sebagai takdir. Takdir dipahami sebagai kekuatan absolut yang sulit untuk diubah. Manusia tidak mampu

mengubah dunia seperti kehendaknya. Karena itu dunia harus diterima apa adanya. Tugas manusia hanya memelihara keselarasan dan keseimbangan. Melalui upaya menjaga keselarasan ini ia menyumbang kesejahteraan masyarakat.

Keinginan seseorang untuk mengubah keadaan sesuai dengan visi yang dimilikinya dianggap sebagai tindakan sia-sia. Apabila ada suatu idealisme moral yang hendak untuk memperbaiki masyarakat dan dunia dan sikap merasa bertanggung jawab untuk mengambil pelbagai tindakan dalam memperbaiki masyarakat bertentangan dengan keselarasan dan akan dianggap menciptakan gangguan. Karena tidak mungkin individu mengubah dunia menurut citacitanya. Sumbangan individu terhadap kebaikan di masyarakat hanya dengan berperan dalam menyumbang pada keadaan yang lebih tenteram, adil dan sejahtera dengan memenuhi kewajiban yang ditentukan bagi saya menurut kedudukan dan aturan dalam masyarakat. Upaya individu ini dengan mempertahankan kerukunan dan mengakui kedudukan para pihak dalam tatanan sosial. Dengan demikian hanya dengan menjaga keselarasan tersebut maka individu dapat memajukan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu norma-norma moral, tidak pernah berlaku kategoris atau berlaku tidak berdasar keharusan. Atas nama norma dasar apa pun tidak dibenarkan untuk melibatkan diri seseorang seratus persen. Norma jangan dipaksakan kepada seseorang secara mati-matian. Semangat yang berlebihan demi mewujudkan cita-cita luhur yang dimutlakkan dan melebihi ukuran yang ditentukan oleh kewajiban-kewajiban sosial sesuai dengan kedudukan seseorang. Menurut orang Jawa, tindakan pemaksaan norma ini kurang estetik dan tindakan bodoh karena melampaui batas-batasnya sendiri. Atas nama keutamaan atau demi tanggung jawab terhadap sesama manusia juga tidak dibenarkan untuk memutlakkan tindakannya sendiri. Karena tidak mungkin memaksa kehendak dengan mengatasnamakan membantu sesama melebihi kemungkinan-kemungkinan yang telah ditentukan oleh tatanan keseluruhan.

Etika Jawa memberi tekanan utama pada standar-standar norma tertentu yang disebut sebagai keutamaan-keutamaan. Keutamaan-keutamaan ini membangun kehendak untuk selalu menjaga keselarasan dalam masyarakat dengan menjauhi konflik dan menunjukkan hormat. Keutamaan-keutamaan tersebut adalah *sepi ing pamrih* atau membatasi diri dari perbuatan yang menjadi sorotan di masyarakat dan *rame ing gawe*

atau kesediaan untuk memenuhi kewajiban masing-masing. Dua keutamaan dalam etika Jawa ini mempunyai ciri-ciri teoretis sebagai berikut. Pertama, keutamaan-keutamaan tersebut bersifat formal dan negatif. Maksudnya, tidak dinyatakan sikap tertentu yang dituntut, melainkan sikap mana yang harus dicegah. Tuntutan yang harus dipenuhi adalah suatu kesediaan hati, bukan suatu sikap tertentu. Maka *sepi ing pamrih* berarti menahan diri dan tidak mementingkan diri. Sikap *rame ing gawe* baru diisi oleh kewajiban pangkat dan kedudukan yang ada di dalam masyarakat. *Sepi ing pamrih* merupakan kesediaan tidak menomorsatukan diri sendiri. *Rame ing gawe* adalah kesediaan melakukan segala kewajiban, tanpa menentukan yang menjadi kewajiban tersebut.

Kedua adalah bahwa kesediaan untuk membatasi dan menyesuaikan diri dengan harapan-harapan masyarakat. Orang yang bertindak *sepi ing pamrih* berarti tidak mempertahankan hak untuk mengusahakan kepentingan-kepentingannya sendiri, baik yang bersifat moral maupun yang bukan moral. Orang yang *rame ing gawe* bersedia memenuhi apa saja sebagai kewajiban pangkat dan kedudukannya. Oleh karena itu dua keutamaan tersebut menuntut bukan kehendak saya yang menjadi penentu, melainkan harapan masyarakat.¹⁸

Dalam masyarakat homogen yang harmonis, konflik-konflik yang muncul antara harapan moral masyarakat dan kehendak anggota-anggota masyarakat jarang terjadi. Namun, semakin sistem normatif masyarakat semakin plural dan tantangan-tantangan yang menghadapi individu semakin kompleks, maka semakin sering terjadi konflik antara kehendak individu dan harapan masyarakat tersebut. Dalam masyarakat kompleks ini muncul dilema yang berkaitan dengan hubungan dengan dua sikap batin utama yang menjadi tuntutan dalam etika Jawa, yaitu *sepi ing pamrih* dan *rame ing gawe*. Apabila dua sikap itu menjadi sikap utama satu-satunya, maka otonomi moral manusia dengan sendirinya dibatasi. Sikap etis dikembalikan pada penguasaan diri dan ketaatan terhadap keadaan masyarakat. Namun terdapat kemungkinan lain, yaitu keadaan tersebut harus dikritik, karena adat-istiadat berperan dalam menunjang ketidakadilan, dan terjadi kerukunan adalah palsu karena tidak dicapai dengan kejujuran. Di samping itu hak yang harus dihormati perlu ditentang karena menyalahgunakan wewenangnya.

Dalam hubungan ini, dalam etika terdapat sikap untuk mengimbangi sikap seperti *sepi ing pamrih* dan *rame ing gawe*, yaitu tuntutan untuk

mengambil sikap moral sendiri dan keberanian moral. Pertama agar jangan menelan begitu saja yang diperintahkan sebagai kewajiban moral oleh pihak luar, seperti lingkungan sosial, adat-istiadat, negara, ideologi. Kedua, agar seseorang mempertahankan sikap yang sudah disadari sebagai kewajiban apabila dicela oleh pihak lain. Kedua sikap ini memang bertentangan dengan dua keutamaan tersebut di atas untuk mencegah konflik dan untuk menunjukkan sikap hormat. Karena tanpa mempertahankan kedua sikap tersebut, etika tidak dapat mempertahankan otonomi.¹⁹

Kesimpulan

Manusia dalam pergaulannya di masyarakat menghadapi beberapa persoalan, antara lain: bagaimana hubungan antara manusia diselesaikan, yang mana harus didahulukan, kepentingan sendiri atautkah kepentingan orang lain, atautkah kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan sendiri. Berbagai pendapat mencoba menjelaskan relasi individu dan masyarakat ini. Sedangkan pandangan Jawa menekankan keselarasan atau harmoni dalam hubungan antara individu dan masyarakat.

Hubungan antara individu, masyarakat dan alam sebagai konsep keutuhan dan harmoni. Individu, masyarakat dan alam terdapat hubungan ketergantungan. Memelihara hubungan yang selaras di antara individu dalam masyarakat akan berperan menciptakan keselarasan dalam alam semesta. Hubungan-hubungan sosial antara individu dan masyarakat atau antara individu-individu dalam masyarakat, seperti halnya hubungan kosmis. Hubungan ini tertata dengan baik dan berpadu dalam sebuah keseluruhan harmonis. Menurut pandangan Jawa tentang masyarakat, hubungan semacam itu terbangun secara hierarkis. Seseorang menduduki posisi status tertentu yang terkait satu sama lain dan dengan cara yang tidak sederajat. Tertib masyarakat ini adalah bagian dari tertib kosmis total. Tugas manusia hanya memelihara keselarasan dan keseimbangan. Melalui upaya menjaga keselarasan ini ia menyumbang kesejahteraan masyarakat.

Manusia harus mengadakan hubungan yang selaras, untuk menghindari konflik terbuka. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan penguasaan diri, pengendalian dorongan dan emosi. Untuk dapat mengendalikan diri ini seseorang dituntut memperkuat diri dimensi batinnya. Pengasahan batin ini dikenal sebagai kebatinan atau olah rasa.

Batin yang sudah tertata dikenal dengan batin yang telah tebal. Oleh karena itu etika yang dikembangkan di masyarakat Jawa berdasar atas rasa. Rasa adalah peka terhadap orang lain, atau empati atas keinginan orang lain, baik dinyatakan atau tidak dinyatakan. Kepekaan rasa yang utama yang menjadi tuntutan dalam etika Jawa, yaitu *sepi ing pamrih* dan *rame ing gawe*.

Catatan Kaki

1. Pramono, *Menggali Unsur-unsur Filsafat Indonesia* (Yogyakarta, Andi Offset, 185), 14.
2. Niels Murder, *Mistisisme Jawa Ideologi di Indonesia* (Yogyakarta, LKIS, 2001), 84.
3. *Ibid*, 84.
4. *Ibid*, 84.
5. *Ibid*, 85.
6. *Ibid*, 85.
7. *Ibid*, 62.
8. *Ibid*, 63.
9. *Ibid*, 64.
10. *Ibid*, 64.
11. *Ibid*, 65.
12. *Ibid*, 68.
13. Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa* (Jakarta, PT Gramedia, 1985), 196.
14. *Ibid*, 197.
15. *Ibid*, 197.
16. *Ibid*, 197.
17. *Ibid*, 204.
18. *Ibid*, 205.
19. *Ibid*, 207.

Daftar Pustaka

- Niels Murder, *Mistisisme Jawa Ideologi di Indonesia*, Yogyakarta, LKIS, 2001.
- Pramono, *Menggali Unsur-unsur Filsafat Indonesia*, Yogyakarta, Andi Offset, 185.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Jawa*, Jakarta, PT Gramedia, 1985.

